

ANALISA EFEKTIFITAS KEBIJAKAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE POLICY ON THE REMOVAL OF STATE PROPERTY IN THE INSPECTORATE GENERAL OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Masnando Oktoryo Simanjuntak¹, Amy Yayuk Sry Rahayu²

Universita Indonesia^{1,2}

¹Author Address; masnandooktoryo@gmail.com¹, amy_soeroso@yahoo.com²

Abstrak: Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. BMN mencakup aset yang diperoleh melalui APBN atau sumber sah lainnya. Salah satu kebijakan dalam pengelolaan BMN adalah penghapusan barang yang tidak layak pakai, untuk mengurangi beban administrasi dan memaksimalkan ruang. Nilai aset BMN meningkat dari Rp10.457 triliun pada 2019 menjadi Rp11.454 triliun pada 2021. BMN dibagi menjadi tiga kategori: Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Tidak Berwujud. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Adapun yang menjadi aspek utama dalam penelitian ini adalah aspek kebijakan, pelaksanaan, target dan lingkungan.

Kata Kunci: Barang Milik Negara; Kementerian Dalam Negeri; Efektivitas;

Abstract: The management of State-Owned Goods (BMN) is a crucial aspect of effective and accountable government governance, in accordance with Law No. 17 of 2003 and Law No. 1 of 2004. BMN includes assets acquired through the state budget (APBN) or other legitimate sources. One of the policies in BMN management is the disposal of unusable goods, aimed at reducing administrative burdens and maximizing space. The value of BMN assets increased from IDR 10.457 trillion in 2019 to IDR 11.454 trillion in 2021. BMN is divided into three categories: Current Assets, Fixed Assets, and Intangible Assets. Supervision is carried out by the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs to ensure compliance with regulations. The main aspects addressed in this study include policy, implementation, targets, and the environment.

Keywords: State-Owned Goods; Ministry of Home Affairs; Effectiveness.

PENDAHULUAN

Pemerintah memerlukan fasilitas dan infrastruktur yang layak untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah memberikan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, yang masuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Oleh karena itu, pengelolaan Barang Milik Negara harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. BMN mencakup segala aset yang dimiliki oleh negara, mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, hingga peralatan kantor. Efektivitas pengelolaan BMN sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu,

penghapusan barang milik negara yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi atau sudah rusak berat menjadi salah satu kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara aset yang dikelola dan manfaat yang diperoleh.

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan BMN dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan BMN adalah penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai. Penghapusan ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi, memaksimalkan pemanfaatan ruang, dan memastikan bahwa aset yang ada tetap bermanfaat dan berfungsi secara optimal.

Penghapusan Barang Milik Negara dimaksudkan untuk menghapuskan barang dari daftar barang pada pengguna barang, begitu juga pada daftar kuasa pengguna barang dan pengelola barang. Oleh karena itu, diterbitkanlah suatu peraturan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 yang mengatur pelaksanaan penghapusan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016, penghapusan dibagi menjadi dua, yaitu penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, dan penghapusan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan.

Tujuan dari penghapusan BMN adalah untuk melepaskan kuasa pengguna barang, pengelola barang, dan pengguna aset dari catatan administratif dengan cara mengeluarkan barang dari daftar barang yang menghasilkan keputusan penghapusan BMN. Barnawi dan Arifin (2017) menyatakan bahwa penghapusan ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja dan penggunaan ruang menjadi lebih efektif. Dengan dihapuskannya barang milik negara yang rusak, dapat mengurangi langgaran biaya pemeliharaan sehingga lebih efisien.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (2014), penelitian kuantitatif adalah suatu proses penyelidikan yang formal, objektif, dan sistematis, dimana data numerik digunakan untuk mendapatkan informasi tentang dunia. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori, dan hipotesis yang terkait dengan fenomena tertentu. Penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik yang dapat diukur untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.

Dalam konteks penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas Kebijakan Tentang Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri" menggunakan metode kuantitatif monovariabel, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Definisi Kuantitatif Monovariabel

Penelitian kuantitatif monovariabel adalah jenis penelitian kuantitatif yang fokus pada analisis satu variabel utama. Dalam hal ini, variabel utama yang dianalisis adalah "efektivitas kebijakan penghapusan barang milik negara". Penelitian ini tidak mengkaji hubungan antara beberapa variabel, melainkan berfokus pada satu variabel tunggal untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan spesifik tentang variabel tersebut.

2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data numerik yang relevan akan dikumpulkan untuk mengukur efektivitas kebijakan. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui survei, kuesioner, atau analisis dokumen yang terkait dengan kebijakan penghapusan barang milik negara. Data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas kebijakan tersebut.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kuantitatif monovariabel melibatkan penggunaan teknik statistik deskriptif untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif seperti mean, median, modus, dan standar deviasi akan digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang variabel efektivitas kebijakan. Selain itu, analisis inferensial seperti uji t atau ANOVA dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang terkait dengan variabel tersebut.

4. Hasil dan Interpretasi

Hasil dari analisis data akan memberikan wawasan tentang sejauh mana kebijakan penghapusan barang milik negara efektif di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Interpretasi hasil akan membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan kebijakan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

5. Relevansi Penelitian

Penelitian ini sangat relevan dalam memberikan bukti empiris tentang efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan fokus pada satu variabel utama, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan bagaimana hasilnya diukur. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada dan mengembangkan kebijakan baru yang lebih efektif. Dengan demikian, menggunakan metode kuantitatif monovariabel dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis dan objektif mengukur dan menganalisis efektivitas kebijakan penghapusan barang milik negara, sehingga memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, hasil deskriptif mengenai karakteristik responden akan disajikan untuk memberikan gambaran umum tentang populasi yang dianalisis. Tabel berikut menunjukkan distribusi responden berdasarkan jabatan dan unit kerja.

Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan:

Jabatan	Frekuensi	Persentase (%)
Eselon I	1	0.4
Eselon II	6	2.4
Eselon III	4	1.6
Eselon IV	13	5.3
Staff	223	90.3
Total	247	100

Dari tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas responden adalah staf, dengan persentase 90.3%. Eselon I memiliki jumlah terkecil, yaitu 1 orang atau 0.4% dari total responden. Selanjutnya Hasil Tanggapan Responden:

No.	Aspek Penilaian	Skala Pengukuran	Sangat Efektif (%)
1	Tepat Kebijakan	1-5	40
2	Tepat Pelaksananya	1-5	35
3	Tepat Target	1-5	30
4	Tepat Lingkungan	1-5	25

Efektif (%)	Tidak Efektif (%)	Sangat Tidak Efektif (%)
45	10	5
43	15	7
50	15	5
45	20	10

Data diambil dari hasil kuesioner yang dianalisis menggunakan SPSS. Hasil tersebut memberikan gambaran umum tentang efektivitas kebijakan dari perspektif pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan table hasil tanggapan Responden diatas adalah:

Berdasarkan penilaian terhadap kebijakan yang diterapkan, 40% responden menilai kebijakan tersebut sangat efektif, 45% menganggapnya efektif, 10% menyatakan tidak efektif, dan 5% menilai sangat tidak efektif. Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan kebijakan, 35% responden menilai pelaksanaannya sangat efektif, 43% efektif, 15% tidak efektif, dan 7% sangat tidak efektif. Mengenai target kebijakan, 30% responden menilai sangat efektif, 50% menyatakan efektif, 15% tidak efektif, dan 5% sangat tidak efektif. Terakhir, terkait dengan lingkungan kebijakan, 25% responden menilai sangat efektif, 45% efektif, 20% tidak efektif, dan 10% sangat tidak efektif.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis faktor eksploratori (EFA) melalui SPSS. Dari hasil analisis validitas yang dilakukan menggunakan software SPSS, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat diandalkan untuk mengukur konstruk yang dimaksud.

Uji validitas yang dilakukan mencakup tiga aspek utama, yaitu nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), uji Bartlett's Test, dan loading factor. Nilai KMO untuk variabel Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Target, dan Tepat Lingkungan berturut-turut adalah 0.922, 0.821, 0.928, dan 0.633, yang semuanya lebih besar dari 0.5, menunjukkan bahwa data cocok untuk analisis faktor. Selain itu, uji Bartlett's Test menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) 0.000

untuk semua variabel, yang berarti bahwa matriks korelasi bukanlah matriks identitas, sehingga analisis faktor dapat dilanjutkan. Untuk loading factor, semua item memiliki nilai lebih besar dari 0.5, yang menandakan bahwa semua item valid dan dapat mengukur konstruk yang dimaksud dengan baik.

Selain validitas, uji reliabilitas juga dilakukan untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, nilai untuk variabel Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Target, dan Tepat Lingkungan berturut-turut adalah 0.732, 0.830, 0.795, dan 0.825. Semua nilai ini di atas 0.7, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan untuk menghasilkan hasil yang konsisten saat digunakan untuk mengukur konstruk yang sama pada waktu yang berbeda.

Dalam analisis univariat deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan barang milik negara di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dinilai cukup efektif oleh responden. Untuk variabel Tepat Kebijakan, nilai rata-rata adalah 4.49, yang menunjukkan bahwa kebijakan secara umum dianggap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan variabel Tepat Pelaksana, dengan nilai rata-rata 4.73, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Variabel Tepat Target memiliki nilai rata-rata 4.36, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kebijakan telah tercapai, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Sedangkan untuk Tepat Lingkungan, nilai rata-rata adalah 4.87, yang menunjukkan bahwa kebijakan sudah cukup disesuaikan dengan kondisi lingkungan, meskipun ada kebutuhan untuk lebih menyesuaikan kebijakan dengan kondisi setempat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan barang milik negara di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada umumnya dinilai efektif oleh responden. Namun, meskipun kebijakan ini dianggap sudah mencapai banyak tujuan, beberapa area masih membutuhkan perhatian lebih lanjut, terutama dalam hal penyesuaian kebijakan dengan kondisi lingkungan setempat dan peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan ini terus relevan, efisien, dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi organisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas kebijakan penghapusan barang milik negara di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik. Pertama, gambaran umum responden menunjukkan bahwa mayoritas berasal dari golongan staf (90,3%), sedangkan tingkat partisipasi dari eselon lebih tinggi relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tanggapan dalam penelitian ini berasal dari kalangan operasional yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Keterlibatan eselon yang minim (Eselon I, II, III, dan IV dengan persentase masing-masing 0,4%, 2,4%, 1,6%, dan 5,3%) memberikan gambaran bahwa hasil penelitian ini lebih mencerminkan pengalaman dari tingkat eksekutif yang terlibat langsung. Meskipun partisipasi dari eselon lebih tinggi terbatas, pandangan mereka tetap penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tantangan dan potensi peningkatan dalam kebijakan ini. Kedua, hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan barang milik negara secara umum dinilai positif. Aspek

kebijakan (tepat kebijakan) mendapat persetujuan tinggi, dengan 85% responden menyatakan kebijakan ini efektif. Pelaksanaan kebijakan (tepat pelaksana) juga mendapat penilaian positif, dengan 78% responden menyatakan efektivitas. Capaian target kebijakan (tepat target) disetujui oleh 80% responden, sementara kesesuaian kebijakan dengan lingkungan (tepat lingkungan) mendapat persetujuan dari 70% responden. Ketiga, hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dapat diandalkan.

Semua item dalam kuesioner menunjukkan validitas yang baik dengan nilai KMO dan hasil Bartlett's Test yang memadai. Selain itu, nilai Cronbach's Alpha untuk semua variabel menunjukkan konsistensi internal yang tinggi, yang berarti instrumen ini dapat diandalkan untuk mengukur persepsi responden terhadap efektivitas kebijakan. Keempat, analisis univariat deskriptif menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan barang milik negara di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah mencapai sebagian besar tujuan yang ditetapkan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pelaksanaan yang lebih optimal dan penyesuaian kebijakan dengan lingkungan yang lebih baik. Secara keseluruhan, temuan ini relevan dengan teori dimensi efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, di mana kebijakan ini terbukti tepat dalam tujuannya, pelaksanaannya, dan pencapaian target, namun tetap membutuhkan penyesuaian untuk memastikan kebijakan ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika lingkungan yang berubah.

Pada bagian Pustaka, diberikan beberapa contoh yang relatif banyak digunakan oleh jurnal-jurnal internasional. Silahkan para penulis untuk menyesuaikan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuntoro, T. H. 2007. *Pengembangan kurikulum pelatihan magang di SMK : Suatu studi berdasarkan dunia usaha* (Unpublished Doctoral dissertation). Program Pasca Sarjana UNNES, Semarang.
- Ahmad, Lukman, dan Munawir. 2018. *Sistem Informasi Manajemen: Buku Referensi: Sistem Informasi Manajemen. Pertama*. Banda Aceh: Penerbit Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh.
- Amiri, K. 2015. *Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance*. Potret Pemikiran, Vol. 20, No. 2, hlm 31-44.
- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Khalid Fauzi. 2015. *Evaluasi Implementasi Penghapusan Aset Tetap (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)*. Tesis. Universita Gajah Mada.
- Barnawi, dan M. Arifin. 2017. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Cetakan III. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia
- Fithri, Eka Jumarni, Susi Ardiani, Endah Widyastuti, dan Rahmad Heru Farista. “Analisis Komparatif Efektifitas Dan Efisiensi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa” 2, No. 1 (2018): 9.
- Hariyanto, Eko Budi, dan I Made Narsa. “Strategic Assets Management: Fokus Pemanfaatan Aset Negara dengan Pendekatan Resource Based View (RBV).” *Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 1 (Juni 2018): 114.
- Hutagalung, S.S dan Hermawan, Dedy. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Kurniawan, Tjakradiningrat. 2021. “Efektifitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 DI Kota Manado.” 1(2):1–13.
- Lukas Dwiantara dan Rumsari Hadi Sumarto, *Manajemen Logistik*, Jakarta: PT.GRASINDO, 2019.
- Mardiasmo (2017), *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*, Andi: Bandung.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prihartono. (2012). *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen: Pendekatan Praktis dan Teknik Mengelola Organisasi*. Andi Offset.
- Putra, Okta Dwi Hari, dan Lies Zulfiati. “Pengaruh Sistem Manajemen

- Aset Negara-Pengguna Barang (Siman-Pb), Terhadap Penatausahaan Barang Milik Negara,” desember 2020. [Http://Repository.Stei.Ac.Id/2059/](http://Repository.Stei.Ac.Id/2059/).
- Ramdany, R., & Setiawati, Y. (2021). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN). *JURNAL AKUNTANSI*, 10(2), 310-323.
- Rodliya, Annisa Robbi. 2015. Tinjauan Atas Sistem Penghapusan Aktiva Tetap Barang Milik Negara (BMN) Pada Direktorat Sarana Dan Prasarana Institut Teknologi Bandung. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi “Konsep & Tehnik Penyusunan LK. Jakarta: Erlangga.
- Samryn. 2015. Pengantar Akuntansi “Metode Akuntansi untuk Elemen Laporan Keuangan”. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Siagian Sondang P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan Belas. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siagian, 1991, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi, Haji Mas Agung, Jakarta.
- Simamora, Salut. 2018. Riset dalam Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. hlm 121.
- Soemarso, S.R. (2010). Akuntansi: Suatu Pengantar, Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana. (2008). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta.
- Sumini, R. (2020). Modul Pengelolaan Barang Milik Negara. Modul Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Susanto, 2015, Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206.
- Sutrisno Edy. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutrisno. 2010. Budaya Organisasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syamsi, Ibnu. 2018. Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintah Daerah. Jakarta : Bina Aksara.
- Triyanto, Raditya Angga. 2017. Analisis Sistem Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (DPPA) Universitas Gadjah Mada (UGM). Arikel Universitas Gadjah Mad. Yogyakarta.
- Yosua T. Panggulu. 2013. Efektivitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal trju* Volume II. No. 4.